

MENELUSURI IDEOLOGI MEDIA TEMPO.CO MELALUI KONSTRUKSI REALITAS BERITA WACANA AMANDEMEN UUD 1945

**Kurniawan Fadilah, Teguh Tjatur Pramono, Rustono Farady Marta,
Joshua Fernando, Endik Hidayat**

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta; Universitas Satya Negara Indonesia;
Insitut Pertanian Bogor; Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur
Email : kurniawan.fadilah@student.iisip.ac.id; teguh.pramono@iisip.ac.id;
rustono.farady@usni.ac.id; saty007joshua@apps.ipb.ac.id; endik.hidayat.adneg@upnjatim.ac.id

Abstract

The research will be purposed to review the news regarding amandemens narration created by online media Tempo.co. The qualitative research will use Robert N. Entman’s Framing Analysis model. The results of the research implicate that there are refutation of amandemend narratives of UUD 1945 proposed by People’s Consultative Assembly of Indonesia. The cause of this phenomena lies within the public’s rejection regarding the amandemend due to it’s danger’s posed. Every assembly’s desicion relies on every stakeholder’s perspective, which makes the decision not one sided nor biased. The author recommends to Tempo.co that PPHN and GBHN has to be explained more comprehensively. The amandemend narrative of UUD 1945 offers a room for both the people’s assembly and Indonesians, which involve interviewees of both sides to create the news article. Tempo.co has to maintain the balance and accuracy of news production as it stands with their ideology.

Keywords: *News Reality Construction, Amandemend Script, UUD 1945, Media Ideology, Tempo.co*

A. PENDAHULUAN

Media massa berperan sebagai sarana peluncaran proses komunikasi. Marta (2017) menunjukkan peranan media massa yang mampu menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan menggunakan peralatan teknis, baik konvensional maupun digital. Peliputan berita menjadi salah satu contoh utama dalam mendistribusikan komunikasi media massa. Seiring perkembangan zaman, jurnalisme semakin bervariasi sehingga dibutuhkan identitas baru dari teknisi peliputan media massa (Putri et al., 2020).

Kemajuan teknologi menjadikan proses komunikasi lebih mudah, setidaknya ini yang disampaikan Satvikadewi (2019), bahwa masyarakat tidak hanya bergantung pada media konvensional. Media digital mulai berkonvergensi untuk menggantikan media konvensional

dengan kemudahan penggunaannya. Berbagai data menunjukkan peningkatan jumlah warga digital secara konstan. Masyarakat semakin awam dengan digitalisasi dan mulai menggunakan teknologi untuk menerima informasi apapun di genggaman tangan mereka.

Media digital memiliki keunggulan dari media lainnya, yakni kecepatannya dalam membuat berita serta kemudahan akses kapan dan dimana saja. Hanya dengan jaringan internet dan gawai khalayak bisa mendapatkan berita apapun yang diminati.

Kebutuhan akan kecepatan mendapat informasi membuat media *online* lebih unggul dibandingkan media lainnya. Media *online* tidak hanya menghadirkan sebuah tulisan dalam menyampaikan informasi, *tetapi terdapat suara serta gambar. Hal ini diuraikan oleh Kraft (2015) bahwa karakteristik multimedia telah mengubah jurnalistik. Wartawan tidak hanya menyediakan narasi dan dokumentasi berita, jurnalisisme juga dilengkapi dengan komposisi visual dan suara.*

Satu dari sekian banyak media *online* yang hadir di Indonesia adalah Tempo.co. Kehadirannya dianggap sebagai situs berita terpopuler dan paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Berbeda dengan situs-situs berita lainnya, Tempo.co memiliki Majalah Tempo Online yang mengupas persoalan secara eksklusif. Tempo.co memiliki perbedaan dengan media *online* pada umumnya dalam menyajikan berita (Tanjung & Marta, 2016).

Topik berita yang menjadi perhatian Tempo.co termasuk tentang MPR dan wacana amandemen UUD 1945 *untuk* hiduapkan lagi GBHN. Hal ini tentu menuai pro-kontra di kalangan masyarakat. Kontroversi dari berita tersebut tidak lain dilatarbelakangi oleh frase perubahan UUD 1945 sebagai dasar negara (Marta, 2018). Pemaknaan masyarakat akan perubahan dasar negara tentunya memercik argumentasi yang berbeda berdasarkan perspektif masing-masing pihak.

Tempo.co pada pendahuluan berita mengimplikasi bahwa Wakil Ketua MPR RI, Sjarifuddin Hasan merencanakan pembangunan berdasarkan Garis Besar Haluan Negara. Amandemen UUD 1945 menjadi salah satu wacana dalam pembangunan tersebut. Gagasan amandemen Undang-undang Dasar 1945 mencuat menjelang berakhirnya masa kerja DPR periode 2014-2019 (Haryono, 2019). Awalnya, ide yang muncul adalah mengimplementasikan kembali GBHN sejalan dengan era sebelum reformasi.

Keinginan membuat haluan negara ini muncul dari PDIP. Dalam persamuhan dengan pimpinan MPR di rumahnya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada 10 Oktober,

Megawati mengemukakan kegelisahannya soal kesinambungan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah. "Saya menangkap kegelisahan beliau. 'Kenapa ya, setiap pergantian presiden, gubernur, atau bupati kebijakannya pasti berubah'," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo menirukan pernyataan Megawati, dikutip dari Majalah Tempo edisi 12 Oktober 2019.

Semakin hari gagasan ini melebar ke mana-mana. Pihak MPR tidak hanya berhenti disitu, ada sejumlah pihak yang menginginkan pemilihan Presiden dan wakilnya kembali diputuskan oleh MPR, perubahan masa jabatan presiden, hingga kembalinya utusan golongan di parlemen. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah mengusulkan presiden-wakil *presiden* dipilih MPR dan kembalinya utusan golongan, seperti era sebelum Reformasi. "Mereka merasa kalau pemilihan (DPR/DPD) maka tokoh agama seperti dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) atau juga lain tidak mampu terpilih," kata Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, Fadel Muhammad pada Kamis, 19 Desember 2019.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi pokok permasalahan dimana konstruksi wacana berita Amandemen UUD 1945 menyelipkan sebuah ideologi dari sineas komunikator kepada khalayak. Penelitian dilakukan untuk mengkaji konstruksi realitas berita terkait Wacana Amandemen UUD 1945 pada Media *Online* Tempo.co. Penelitian ini merupakan pengaplikasian teori komunikasi. Salah satu teori yang menjadi fokus adalah *framing* model Robert N. Entman dalam membedah konstruksi realitas berita terkait Wacana Amandemen *UUD* 1945 pada Media Online Tempo.co. Secara praktis, penelitian ini sebagai masukan atau saran bagi redaksi Tempo.co dalam melakukan konstruksi realitas berita terkait Wacana Amandemen UUD 1945. Serta agar masyarakat berpikir kritis pada setiap informasi yang diperoleh dari media terkait Wacana Amandemen UUD 1945.

B. TINJAUAN TEORITIS

ANALISIS FRAMING ROBERT N. ENTMAN

Konteks pesan media merepresentasikan realita yang telah dibangun dalam sebuah narasi. Konstruksi realitas media memiliki makna yang ditanamkan sineas komunikator untuk menceritakan fenomena kepada khalayak (Harry et al., 2021). Perspektif pesan inilah

yang dibahas pendekatan *framing* untuk memahami ideologi sineas komunikator yang hendak menyampaikan pesan.

Hal penting yang menjadi perhatian media adalah realita kebenaran terhadap suatu kejadian. Ini menjadi tugas yang harus dilaksanakan oleh media. Kishore (2020) menjelaskan framing sebagai teknik penyajian realitas akan sebuah fenomena yang difabrikasi secara halus. Fabrikasi tersebut akan memberikan identitas baru dari sebuah fenomena menggunakan foto, video atau ilustrasi yang mendukung. Hal lain yang juga penting dalam *framing* dapat diungkapkan di sini, yakni ketika sesuatu diletakan dalam *frame*, maka ada bagian yang dibuang dan ada yang terlihat atau tampak.

Mengacu pada perhatian terhadap realita kebenaran, media dapat membingkai dan mengkonstruksi pemberitaan seperti yang diungkapkan Kurniasari (2018) bahwa framing mendekati khalayak akan bingkai realita dari sebuah fenomena yang difabrikasi oleh media. (Konieczna et al., 2014) menambahkan bahwa framing membedah fenomena untuk membangun sebuah narasi berita. Pemaknaan dari narasi tersebut bervariasi tergantung dengan perspektif komunikator dan khalayak

Pangestu (2021) menyebutkan *framing* dimaknai pertama kali sebagai struktur konseptual yang membangun sebuah konstruksi pandangan akan sebuah peristiwa. Pointnya adalah *framing* dianggap sebagai pemingkai terhadap suatu realitas yang telah dikonstruksi oleh media, sehingga kebenaran yang disajikan bukanlah yang sesungguhnya melainkan telah digiring secara halus sesuai dengan cara pandang media tersebut.

Jika dikaitkan dengan penelitian penulis yaitu konstruksi realitas berita mengenai Wacana Amandemen UUD 1945 pada media *online* Tempo.co Penulis memilih teori Framing model Robert N. Entman. Melalui teori tersebut penulis membedah berita yang disajikan oleh Tempo.co hal ini terkait bagaimana media tersebut menyisipkan ideologinya serta bagaimana konstruksi yang dilakukan terhadap realita yang ada. Analisis yang penulis lakukan menggunakan elemen yang terkandung dalam framing Robert. N. Entman. Hal ini mengenai berita Wacana Amandemen UUD 1945.

Gagasan teori milik Robert N. Entman ini mengarah pada identifikasi masalah, sumber masalah, nilai *moral* yang ditayangkan dan solusi yang diberikan dalam setiap narasi teks. Penekanan perspektif terhadap peristiwa akan dipilah analisis *framing* oleh Robert N. Entman. Elaborasi dari gagasan ini akan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kerangka Framing Robert N. Entman

Elemen Framing	Hal yang Diamati
Define Problems (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu permasalahan dilihat?
Diagnose Causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
Make Moral Judgement (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
Treatment Recommendation (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?

Sumber: (Maulany & Abdullah, 2019)

Define problems merupakan bingkai utama yang menjelaskan peristiwa yang diinterpretasi jurnalis. *Peristiwa* dapat dipahami melalui berbagai variasi dan memberikan fabrikasi realita yang berbeda. *Diagnose Causes* merupakan elemen *framing* untuk pelaku atau individu yang terlibat dalam sebuah fenomena. Pelaku dapat bersifat subyek dan objek sehingga dapat diinterpretasi secara berbeda oleh berbagai pihak.

Make Moral Judgement digunakan untuk memberikan argumen pada permasalahan yang telah dibangun. Gagasan ini dikuatkan dengan aspek yang lebih dikenal khalayak untuk mempermudah proses penerimaan informasi. *Treatment Recommendation* digunakan untuk menilai keinginan komunikator. Keinginan tersebut akan menjadi potensi solusi dari masalah yang tertera.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis framing Robert N. Entman untuk meninjau konstruksi realita wacana Amandemen UUD 1945 pada Tempo.co. Analisis ini akan menelaah fakta yang difabrikasi menjadi informasi berita. Bahan penelitian semua berita Wacana Amandemen UUD 1945 pada Tempo.co mulai

dari 16 Agustus hingga 16 Oktober 2021. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu teks berita pada Tempo.co yang terdiri dari kata, kalimat dan paragraf.

Semua berita mengenai Wacana Amandemen UUD 1945 pada Tempo.co edisi 16 Agustus hingga 16 Oktober 2021 menggunakan *purposive sampling*. Selama kurun waktu tersebut dianggap telah diadakan rapat paripurna yang menyinggung soal wacana amandemen UUD 1945 dan ramainya persoalan amandemen secara keseluruhan. Berdasarkan Populasi dalam penelitian ini, Penulis memilih masing-masing dua sampel dari lima topik yang ada karena setiap kategori memiliki karakteristik tertentu sebagai bahan yang akan diamati dalam penelitian dan menganalisis apakah setiap topik dapat memenuhi setiap elemen dari framing model Robert N. Entman.

Tabel 2. Sampel Penelitian tentang Wacana Amandemen UUD 1945 pada Tempo.co

No.	Judul Berita	Tanggal Terbit	Topik Berita
1.	Pakar Sebut Sinyal Jokowi Restui Amandemen UUD 1945 Sangat Berbahaya	16 agustus 2021 pukul 15.32 wib	Analisa Pakar Hukum dan Tata Negara
2.	Soal Amandemen Ketua MPR Bilang Konstitusi Bukan Kitab Suci	18 Agustus 2021 Pukul 11.44 wib	Pandangan Pimpinan MPR
3.	Gerindra Amandemen UUD Bisa Jadi Bola Liar Presiden dipilih MPR	7 Oktober 2021 Pukul 19.29 wib	Pernyataan Politisi Partai Politik
4.	Survei Mayoritas Menolak Jika Amandemen Untuk Perpanjangan Jabatan Presiden	23 Agustus 2021 Pukul 18.10 wib	Hasil Lembaga Survey
5.	Jokowi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Fadjoel Beliau Setia Pada Reformasi	11 September 2021 Pukul 20.13 WIB	Tanggapan Presiden
6.	Ketua MPR Sebut PPHN dan Amandemen uud 1945 Tergantung Pimpinan Parpol	18 Agustus 2021 Pukul 14.41 wib	Pandangan Pimpinan MPR
7.	Wacana Amandemen UUD 1945 Pakar Hukum UGM Ingatkan Kasus Carlos Menem	4 September 2021 Pukul 19.52 wib	Analisa Pakar Hukum dan Tata Negara
8.	Megawati Perintahkan Agenda Amandemen UUD 1945 Untuk Slowing Down	24 Agustus 2021 Pukul 13.36 wib	Pernyataan Politisi Partai Politik
9.	Survei SMRC Publik Nilai Tak Ada Urgensi Amandemen UUD 1945	15 Oktober 2021 Pukul 16.46 wib	Hasil Lembaga Survey
10.	Mahfud : Jokowi Minta Penetapan Pemilu 2024 Tak Terpengaruh Isu Amandemen	24 September 2021 Pukul 08.35 wib	Tanggapan Presiden

Sumber: Tempo.co

D. PEMBAHASAN

Berita tentang Wacana Amandemen UUD 1945 mulai ramai sejak digelarnya Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo membeberkan perlunya amandemen konstitusi untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara. Bamsuet mengklaim banyak pandangan masyarakat yang menghendaki adanya kesamaan visi dalam pembangunan nasional dan daerah sehingga perlu PPHN tersebut. Tahapan analisis akan dimulai dari hasil interpretasi penulis akan perspektif Tempo.co selama menarasikan berita Amandemen UUD 1945 (Tjajadi et al., 2021).

Pada sampel pertama dalam wacana, Tempo.co mengarahkan pemberitaan ini kepada persoalan hokum dan tata negara. Pakar menilai ada dukungan dari Presiden terkait wacana amandemen UUD 1945. Feri Amsari Pakar Hukum dan Tata Negara Universitas Andalas menilai dukungan dapat dilihat dari pernyataan Presiden yang mengapresiasi MPR yang mengkaji ikhwal pokok-pokok haluan negara (Susanto & Kumala, 2019). Tempo.co memperkirakan penyebab Feri Amsari menyatakan bahwa Jokowi restui amandemen UUD 1945 berbahaya karena berpotensi menambahkan kewenangan MPR. Beliau membantah perubahan konstitusi akan menyebar ke pasal-pasal lainnya. Nilai moral yang disajikan oleh Tempo.co dalam berita ini yakni penjelasan dari Feri Amsari yang mengimplikasi konstitusi sudah membatasi kewenangan MPR untuk mengubah dan mengesahkan Undang-Undang Dasar, melantik, dan memberhentikan presiden-wakil presiden. Penyelesaian masalah yang ditekankan oleh Tempo.co pada kasus ini dengan memberikan pengertian mengapa perlu adanya amandemen dengan maksud menetapkan pokok-pokok haluan negara (PPHN) melalui penyampaian ketua MPR RI. Selain itu, pernyataan ketua MPR diperkuat dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden terkait pokok-pokok haluan negara (PPHN).

Pada sampel kedua, Tempo.co mengarahkan pemberitaan ini kepada persoalan pandangan dari Pimpinan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang mengatakan bahwa undang-undang bukanlah kitab suci oleh karnanya perlu penyempurnaan. Bamsuet, sapaan akrabnya, menilai konstitusi terus berkembang seiring dinamika masyarakat. Tempo.co memperkirakan penyebab masalah dalam berita ini adalah adanya keinginan untuk mengubah konstitusi berkorelasi dengan adanya arus aspirasi yang berhasil diterima MPR yaitu kehendak menghadirkan kembali dasar haluan negara. Nilai moral yang disajikan oleh Tempo.co dalam berita ini yakni melalui penegasan yang dikatakan ketua MPR bahwa sudah tiga periode ini

MPR diamanatkan untuk menghadirkan PPHN. Penyelesaian masalah yang ditekankan oleh Tempo.co adalah penjabaran ketua MPR yang langsung menjelaskan jika Majelis Permusyawaratan Rakyat menunjukkan responsifnya dalam menyikapi arus besar reformasi masyarakat pada era-era lalu (Fernando et al., 2020).

Pada sampel ketiga, Tempo.co mengarahkan pemberitaan ini kepada persoalan potensi kekuatan penuh MPR dalam menunjuk Presiden secara langsung. Kekhawatiran ini justru hadir dari salah satu wakil ketua MPR Ahmad Muzani. Muzani mengingatkan datangnya wacana amandemen UUD 1945 bisa menjadi bola panas yang berdampak kemana mana salah satunya Presiden dipilih kembali oleh MPR. Tempo.co memperkirakan penyebab masalah dalam berita ini adalah jika GBHN diberlakukan kembali maka perlu adanya pertimbangan yang dilakukan. Nilai moral yang disajikan oleh Tempo.co dalam berita ini yakni muzani sebagai wakil ketua MPR tetap menginginkan tidak ada penambahan periode jabatan bagi Presiden serta tidak mengubah pemilihan langsung dalam pemilihan presiden (Umari & Indra Dewi, 2020). Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh Tempo.co adalah adanya pandangan dari fraksi NasDem, Johnny G. Plate yang senada dengan Muzani dalam memberikan pandangan terkait wacana UUD 1945. Dirinya mengatakan GBHN harus dibahas secara komperhensif dan tidak sepotong-sepotong, terlebih masalah masa jabatan Presiden.

Pada sampel keempat, Tempo.co mengarahkan pemberitaan ini kepada persoalan maraknya wacana amandemen UUD 1945 membuat masyarakat ikut andil dalam memberikan pendapat terkait penambahan priode masa jabatan Presiden. Lembaga survei Fixpoll menyelenggarakan survei pada 16-27 Juli 2021 dengan mengambil sampel dari 1.240 responden dan memberikan hasil bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden. Perkiraan Tempo.co mengenai penyebab masalah berita ini adalah digencarkannya wacana amandemen UUD 1945 oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Tidak sedikit penolakan yang hadir terkait wacana amandemen UUD 1945 saat ini. Selain penolakan dari masyarakat, beberapa partai politik pun menolak ada wacana tersebut. Nilai moral yang disajikan oleh Tempo.co dalam berita ini yakni tetap mengutamakan pandangan pada setiap pemegang kuasa di MPR. Penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh Tempo.co merupakan penegasan dari partai politik yang menyatakan bahwa amandemen UUD 1945 tidak akan terjadi.

Pada narasi kelima, Tempo.co mengarahkan pemberitaan ini kepada persoalan berkaitan dengan tanggapan Presiden terkait Wacana Amandemen UUD 1945. Ketidaksetujuan Presiden terkait perpanjangan masa jabatan yang sedang ramai diperbincangkan dalam wacana amandemen UUD 1945. Perkiraan Tempo.co mengenai penyebab masalah yang terjadi dalam kasus ini adalah Wacana jabatan 3 periode Presiden. Nilai moral yang disajikan oleh Tempo.co dalam berita ini yakni Presiden memahami jika amandemen UUD 1945 adalah domain MPR. Juru Bicara Presiden pun menambahkan jika Presiden ingin menjaga demokrasi dan reformasi. Penyelesaian masalah yang ditekankan Tempo.co adalah melalui pernyataan yang dilontarkan oleh juru bicara Presiden. Fadjoel menerangkan bahwa Jokowi akan setia pada amandemen pertama sebagai bentuk pengingat akan demokrasi dan reformasi (Kushananto & Daud, 2019).

Wacana keenam mengimplikasi Tempo.co mengarahkan pemberitaan ini kepada persoalan pandangan dari pimpinan MPR. Ketua MPR mengatakan jika PPHN dan Amandemen UUD 1945 tergantung bagaimana dinamika politik yang ada. Bamsuet memberi penjelasan PPHN ini sangat tergantung pada stakeholder di MPR. Perkiraan Tempo.co mengenai penyebab masalah yang terjadi dalam kasus ini adalah MPR berkeinginan adanya haluan negara yang merupakan perencanaan visioner. Menurut Bamsuet, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) selama ini bergantung kepada visi misi Presiden yang terpilih. Sehingga MPR PPHN bisa berubah setiap pergantian Presiden. Nilai moral yang disajikan oleh Tempo.co dalam berita ini yakni sikap ketua MPR yang bersafari menemui pimpinan partai politik dalam menanyakan sikap terhadap akan dibentuknya PPHN yang wacanakan oleh MPR. Bamsuet mengklaim ada yang khawatir dan ada juga yang mengharuskan PPHN ini dihadirkan. Penyelesaian masalah yang ditekankan Tempo.co adalah ketika ketua MPR menerangkan sikap pemimpin partai politik tercermin dari anggotanya yang ada diparlemen.

Sampel ketujuh menunjukkan Tempo.co yang mengarahkan pemberitaan ini kepada persoalan masalah hukum dan tata negara. Sejak kabar wacana amandemen UUD 1945 mencuat, isu penambahan masa jabatan Presiden pun sering terdengar. Banyak pendapat mengatakan, jika isu masa jabatan presiden menumpang dengan isu wacana amandemen. Beberapa pakar pun memberi pandangannya terkait isu ini, salah satunya pakar hokum tata negar fakultas hokum UGM, Andi Sandi. Perkiraan Tempo.co mengenai penyebab masalah

yang terjadi dalam kasus ini adalah isu wacana amandemen UUD 1945 terkesan memaksakan dan dapat menimbulkan ketidakstabilan negara itu sendiri. Sandi mengungkapkan bahwa Undang-undangan dasar 1945 merupakan fondasi negara, sehingga melakukan amandemen merupakan tindakan menggeser fondasi negara (Asrori et al., 2019). Nilai moral yang disajikan oleh Tempo.co dalam berita ini yakni melalui ungkapan sandi terkait filosofis UUD 1945 yang memiliki arti sebagai kontrak panjang dalam penyelenggaraan negara. Tidak hanya itu, Sandi juga mengingatkan jika amandemen UUD 1945 didasari hanya karena hasrat sesaat maka tidak akan berkepanjangan. Penyelesaian masalah yang ditekankan Tempo.co adalah contoh Carlos Menem yang disinggung oleh Sandi lalu dikaitkan dengan keadaan MPR saat ini yang memiliki wacana amandemen UUD 1945.

Narasi kedelapan dalam Tempo.co mengarahkan pemberitaan ini kepada pandangan dari partai politik. Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengambil sikap tidak terburu-buru terkait dengan wacana amandemen UUD 1945 meskipun wacana ini muncul diawali dari rekomendasi pada kongres V PDIP. Megawati menginstruksikan partai untuk lebih dulu mementingkan gotong royong guna menangani pandemi COVID-19. Perkiraan Tempo.co mengenai penyebab masalah yang terjadi dalam kasus ini adalah wacana amandemen UUD 1945 yang muncul ketika kongres V PDIP lalu kemudian sikap Megawati Soekarnoputri memilih untuk tidak terburu-buru dalam menyikapi amandemen UUD 1945 (Romadlon, 2016). Nilai moral yang disajikan oleh Tempo.co dalam berita ini yakni menghadirkan nilai kepentingan yang perlu didahului. Keadaan negara yang sedang tidak baik-baik saja membuat PDIP mengambil sikap dengan melihat dari kepentingan mana yang harus didahulukan. Penyelesaian masalah yang ditekankan Tempo.co adalah kesepakatan antara Gerindra dan PDIP terakit kesamaan dalam keinginan mengamandemen UUD 1945 namun tidak serta merta dengan cepat bisa merealisasikannya karena tetap harus menunggu hasil kajian dari MPR.

Wacana kesembilan oleh Tempo.co mengarahkan pemberitaan ini kepada hasil dari lembaga survey terhadap amandemen UUD 1945 kepada masyarakat. Hasil survey yang dirilis oleh SMRC menunjukkan jika publik menilai amandemen UUD 1945 belum diperlukan. Publik menilai belum ada urgensi yang mengharuskan UUD 1945 untuk diamandemen. Perkiraan Tempo.co mengenai penyebab masalah yang terjadi dalam kasus ini

adalah hasil sigi memperoleh persentase masyarakat tidak setuju terhadap pemilihan presiden dipilih oleh MPR lebih besar dibandingkan pemilihan secara langsung. Selain itu, masyarakat juga lebih banyak yang menginginkan untuk mempertahankan aturan yang sudah ada daripada harus mengubahnya. Nilai moral yang disajikan oleh Tempo.co dalam berita ini yakni amanah konstitusi mewajibkan jabatan presiden maksimal 2 periode yang masing-masing dengan durasi waktu lima tahun. Penyelesaian masalah yang ditekankan Tempo.co adalah memberikan penjabaran proses survey yang dilakukan oleh SMRC terkait ihwal wacana amandemen UUD 1945.

Sampel berita terakhir dari Tempo.co mengarahkan pemberitaan ini kepada Presiden yang memberikan tanggapan terkait wacana amandemen UUD 1945. Mahfud Md sebagai Menkopolkam mengatakan jika Presiden meminta pemilu segera ditetapkan tanggalnya dan tidak terpengaruh dengan isu amandenn. Perkiraan Tempo.co mengenai penyebab masalah yang terjadi dalam kasus ini adalah ketetapan tanggal pemilu yang diminta kepastiannya oleh Presiden, namun Mahfud mengatakan jika masih ada beberapa pilihan tanggal dan mulai mengerucut. Sedangkan Mendagri, Tito Karnavian menerangkan jika dirinya meminta pemilu dimundurkan beberapa bulan dengan alasan masih ada pengaruh polarisasi. Nilai moral yang disajikan oleh Tempo.co dalam berita ini yakni dalam undang-undang sudah diatur bagaimana mekanisme keikutsertaan dalam pelaksanaan pemilu (Haryono, 2019). Menkopolkam menjelaskan opsi yang hadir dan bagaimana partai merespon dengan baik maksud yang disampaikan. Penyelesaian masalah yang ditekankan Tempo.co adalah ketetapan yang disampaikan KPU sebagai lembaga yang mengurus kegiatan pemilihan umum dan juga kerja bersama dengan DPRD, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Berita tentang Wacana Amandemen UUD 1945 mulai ramai sejak digelarnya Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebutkan perlunya amandemen UUD 1945 untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara. Bamsuet menambahkan banyak perspektif masyarakat yang menghendaki adanya kesamaan visi dan misi dalam pembangunan Nusantara dan daerah sehingga perlu PPHN tersebut.

Analisis framing digunakan sebagai salah satu pendekatan guna menggali bagaimana cara pandang yang digunakan oleh jurnalis ketika menyeleksi fenomena kehidupan dan menulis

berita. Perspektif dari jurnalis pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil oleh seorang wartawan (Febrianno Boer et al., 2020). Apa yang ingin ditekankan, yang dihilangkan kemudian arahan berita tersebut ditujukan kepada khalayak.

Gagasan milik Robert N. Entman memiliki empat elemen untuk membedah pemberitaan yakni pemberian definisi (*Define Problem*), menjelaskan sumber masalah atau penyebab peristiwa (*Diagnose Causes*), memberikan keputusan moral dalam pemberitaan (*Make Moral Judgement*), serta memberi penyelesaian atau rekomendasi terhadap permasalahan (*Treatment Recommendation*).

Wacana amandemen UUD 1945 yang dicanangkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan dikuatkan pada kekhawatiran akan penambahan masa jabatan Presiden. Ketua MPR menginginkan adanya amandemen untuk menyempurnakan UUD 1945 namun tidak disetujui oleh masyarakat.

Penolakan terhadap wacana amandemen UUD 1945 karena dianggap akan menjadi hal yang berbahaya. Masyarakat meminta MPR untuk mempertimbangkan GBHN yang akan diberlakukan kembali serta menghadirkan kembali PPHN. Seruan penolakan paling keras ada pada wacana jabatan tiga periode Presiden. Wacana ini menekankan tugas, fungsi, serta tanggungjawab dari MPR yaitu mengubah dan mengesahkan Undang-Undang Dasar, melantik, dan memberhentikan presiden-wakil presiden (Komalasari & Fajarica, 2019). Semua keputusan MPR tetap mengutamakan pandangan pada setiap stakeholder di MPR, tidak bisa diputuskan sepihak.

PPHN maupun GBHN pembahasannya harus secara komperhensif. Sikap responsifnya dalam menyikapi arus besar reformasi masyarakat pada era-era lalu yang ditunjukkan MPR merupakan bentuk pengingat akan demokrasi dan reformasi.

Berdasarkan analisis pada sampel berita menggunakan model framing Robert N. Entman, dapat disimpulkan tentang berita wacana amandemen UUD 1945 bahwa Tempo.co memberikan ruang yang sama terhadap MPR dan Masyarakat, dengan menyertakan narasumber dari pihak MPR dan dari pihak Masyarakat dalam beberapa berita yang dibuat.

Pembingkai berita berkaitan dengan bagaimana media massa dalam menentukan sumber beritanya. Tempo.co berusaha membingkai berita dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang MPR dan dari sudut pandang pihak Masyarakat. Tempo.co juga membingkai fakta bahwa masyarakat meminta MPR tidak meneruskan wacana amandemen UUD 1945 terlebih

pada poin penambahan masa jabatan Presiden. Masyarakat menyatakan ketidaksetujuan terhadap wacana amandemen UUD 1945 digambarkan oleh lembaga survei. Selain masyarakat, politis partai juga pakar hukum dan tata negara cenderung menolak diadakannya amandemen terhadap UUD 1945.

Ideologi memiliki makna yang bipolar. Pemaknaan positif dari ideologi dijelaskan sebagai pandangan individu atau kelompok terhadap dunia untuk membela nilai yang mereka anggap benar. Pandangan negatif dari ideologi terdapat dari falsifikasi kesadaran untuk memutarbalikkan fakta terhadap pemaknaan individu atau kelompok (Novarisa, 2019).

Briandana (2019) menuturkan ideologi media sebagai ideologi yang menjadi landasan visi dan misi media tersebut. Pemahaman setiap anggota organisasi akan ideologi media menjadi urgensi bagi setiap organisasi. Tempo.co membutuhkan dasar perspektif tersebut untuk merancang narasi berita yang memberikan identitas organisasi kepada khalayak. Ideologi media Tempo.co mempengaruhi pemberitaan yang disajikan, terutama pemberitaan tentang Wacana Amandemen UUD 1945. Hal ini sesuai dengan Visi yang dimiliki Tempo berupa menjadikan organisasi sebagai acuan dalam meningkatkan kebebasan masyarakat untuk berpendapat serta membangun nusantara yang menghargai kecerdasan dan perbedaan. Tempo.co sangat memanfaatkan ideologi medianya untuk mengkonstruksikan fakta dan topik berita yang berbeda di lapangan. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Castaldi (2021) bahwa ideologi memosisikan diri terhadap nilai yang diyakini, baik secara individu atau kolektif untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, Sebagai media massa, Tempo.co berusaha memberikan informasi yang berimbang mengenai berita Wacana Amandemen UUD 1945. Dalam pemberitaannya Tempo.co terlihat lebih menonjolkan berita kearah dampak yang muncul dari Wacana Amandemen UUD 1945 tersebut. Tempo.co berupaya mengarahkan khalayak agar memiliki sudut pandang yang jernih dalam menilai dampak yang akan timbul bila Wacana Amandemen UUD 1945 tetap dilaksanakan. Tempo.co menampilkan peran dan fungsi MPR sebagai bagian dari masyarakat yang harus mendengarkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan undang-undang. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa Tempo.co menyampaikan berita kepada khalayak dengan fakta menyeluruh dan berimbang sesuai dengan ideologi yang dimiliki Tempo.co.

Wacana amandemen UUD 1945 yang dicanangkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat mendapat penolakan dari masyarakat. Penolakan dikuatkan pada kekhawatiran akan penambahan masa jabatan Presiden. Selain itu, ketua MPR menginginkan adanya amandemen untuk menyempurnakan UUD 1945 dengan menghadirkan kembali PPHN dan GBHN sebagai alat penyelaras kebijakan dan keputusan dari tingkat pusat hingga daerah, namun tidak disetujui oleh masyarakat (Kinanti & Afriani, 2021). Bagi masyarakat hadirnya PPHN dan GBHN akan memberikan kekuatan penuh terhadap MPR dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi yang sudah berlaku.

Penolakan terhadap wacana amandemen UUD 1945 karena dianggap akan menjadi hal yang berbahaya. Masyarakat meminta MPR untuk mempertimbangkan GBHN yang akan diberlakukan kembali serta menghadirkan kembali PPHN. Seruan penolakan paling keras ada pada wacana jabatan 3 (tiga) periode Presiden. Masyarakat menilai belum ada urgensi yang mengharuskan undang-undang untuk di amandemen.

Menekankan tugas, fungsi, serta tanggungjawab dari MPR yaitu mengubah dan mengesahkan Undang-Undang Dasar, melantik, dan memberhentikan presiden-wakil presiden. Semua keputusan MPR tetap mengutamakan pandangan pada setiap stakeholder di MPR, tidak bisa diputuskan sepihak. Hal ini berkaitan dengan wacana amandemen UUD 1945 yang memiliki arti sebagai kontrak panjang dalam penyelenggaran negara

Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) maupun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) pembahasannya harus secara komperhensif. Sikap responsifnya dalam menyikapi arus besar reformasi masyarakat pada era-era lalu yang ditunjukkan MPR merupakan bentuk pengingat akan demokrasi dan reformasi.

Dengan demikian Tempo.co memberikan ruang yang sama terhadap MPR dan Masyarakat, dengan menyertakan narasumber dari pihak MPR dan dari pihak Masyarakat dalam beberapa berita yang dibuat.

E. KESIMPULAN

Tempo berusaha memberikan informasi yang berimbang mengenai berita wacana amandemen UUD 1945 tersebut. Tempo berupaya mengarahkan khalayak agar memiliki sudut pandang yang jernih dalam menilai dampak yang akan timbul bila wacana amandemen UUD 1945 tetap dilaksanakan. Tempo menampilkan peran dan fungsi MPR sebagai bagian

dari masyarakat yang harus mendengarkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan undang-undang. Hasil analisis menunjukkan bahwa Tempo.co menyampaikan berita kepada khalayak dengan fakta menyeluruh dan berimbang sesuai dengan ideologi yang dimilikinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait sudut pandang berita tentang wacana Amandemen UUD 1945 pada media online Tempo.co. Setidaknya media ini tetap mempertahankan pemberitaan yang berimbang dan akurat serta senantiasa menyampaikan berbagai isu yang berkembang sesuai fakta yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori, A., Bakhita, F., & Aulia, R. (2019). Lunturnya Norma Pancasila di Era Milenial 2019/2020. *JIPP Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 4(2), 83–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jipp.v4i2.86>
- Briandana, R. (2019). Television and National Identity: An Ethnography of Television Audience in the Border of Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(1), 72. <https://doi.org/10.22146/jsp.37586>
- Castaldi, J. (2021). A multimodal analysis of the representation of the Rohingya crisis in BBC's Burma with Simon Reeve (2018): Integrating Audience Research in Multimodal Critical Discourse Studies . *Multimodal Communication*, 10(1), 55–72. <https://doi.org/10.1515/mc-2020-0014>
- Febrianno Boer, R., Nugroho Widiyanto, Y., Amanda, M., Marta, R. F., & Pristianita, S. (2020). Comparative analysis of online news content objectivity on Covid-19 between Detik.com and Kompas.com. *Informatologia*, 53(3–4), 127–139. <https://doi.org/10.32914/i.53.3-4.1>
- Fernando, J., Sasongko, Y. P. D., & Marta, R. F. (2020). Aktivasi Psikologi Kognitif Melampaui Kesepian dengan Perspektif Komunikasi dalam Film Joker. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 109–119. <https://doi.org/10.35326/medialog.v3i1.517>
- Harry, H., Marta, R. F., & Briandana, R. (2021). Memetakan Tautan Budaya Lasem melalui Dokumenter Net . Biro Jawa Tengah dan MetroTVNews. *ProTVF*, 5(2), 227–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/ptvf.v5i2.33411>
- Haryono, C. G. (2019). Genealogi Wacana Pada Pesan Agitatif Pidato Prabowo Subiyanto Tentang Nkri Bubar Tahun 2030. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 5(01), 030. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v5i01.1740>
- Kinanti, D. I., & Afriani, A. L. (2021). The Influence of E-WOM and Celebrity Endorser on Instagram on Ortuseight Shoes Purchase Decisions. *JCommsci - Journal Of Media and Communication Science*, 4(3), 149–155. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v4i3.146>
- Kishore, S., & Stiff, A. (2020). Co-constructed Documentary Film: collaboration, dialogue, and performance in researching gender and contemporary art in Vietnam. *Feminist Media Studies*, 00(00), 1–19. <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1793793>
- Komalasari, M. A., & Fajarica, S. D. (2019). Proses Komunikasi Antarpribadi Mahasiswa Bima

- di Kawasan Lawata , Kota Mataram. *JCommsci - Journal Of Media and Communication Science*, 2(2), 5–8. <https://jcomm.unram.ac.id/index.php/jcomm/article/viewFile/32/33%0D>
- Konieczna, M., Mattis, K., Tsai, J. Y., Liang, X., & Dunwoody, S. (2014). Global journalism in decision-making moments: A case study of Canadian and American television coverage of the 2009 United Nations framework convention on climate change in Copenhagen. *Environmental Communication*, 8(4), 489–507. <https://doi.org/10.1080/17524032.2014.909509>
- Kraft, N., & Seely, N. (2015). Making mojos: How iPads are enhancing mobile journalism education. *Journalism and Mass Communication Educator*, 70(3), 220–234. <https://doi.org/10.1177/1077695815596493>
- Kurniasari, N., & Aji, G. G. (2018). Kepemilikan Dan Bingkai Media (Analisis Framing Pemberitaan Joko Widodo Sebagai Kandidat Calon Presiden Pada Koran Sindo). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 6(1), 96. <https://doi.org/10.30659/jikm.6.1.96-116>
- Kushananto, & Daud, S. (2019). Communication Style of State Leadership and It's Impact on Indonesian Military Elite Relationships. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 35(3), 1–20. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2019-3503-01>
- Marta, R. F. (2017). Refleksi Hibriditas Budaya dalam Pancasila pada Realitas dan Media sebagai Identitas Bangsa. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 3(01), 1–12. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v3i01.841>
- Marta, R. F. (2018). Polemik Kebhinnekaan Indonesia Pada Informasi Instagram @Infia_Fact Terkait Patung Kwan Sing Tee Koen Tuban. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 3(02), 63–71. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v3i02.922>
- Maulany, S. P., & Abdullah, A. (2019). Pemberitaan film A Man Called Ahok dan film 212 di media online. *ProTVF*, 3(2), 155. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v3i2.22940>
- Novarisa, G. (2019). Dominasi Patriarki Berbentuk Kekerasan Simbolik Terhadap Perempuan Pada Sinetron. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 5(02), 195. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v5i02.1888>
- Pangestu, P. P. (2021). Efektivitas Dakwah Hadis dalam Media Sosial: Analisis atas Teori Framing Robert N. Entman. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1), 67. <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i1.2958>
- Putri, L. D., Annisarizki, & Andika, D. (2020). The Journalists has Built Self Meaning : Spreading Hate Speech in Presidential Election 2019 in Banten. *ASPIRATION Journal*, 1(2), 182–207.
- Romadlon, S. G. (2016). Implikasi Pergeseran Sistem Politik terhadap Hukum dan Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(4), 868. <https://doi.org/10.31078/jk1349>
- Satvikadewi, A. A. I. P., Danadharta, I., & Aprianto, B. (2019). Keberlanjutan Jurnalistik Sehat di Era Konvergensi Daring Suarasurabaya.net dengan Pendekatan Engagement Pyramid. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 5(2), 177–194. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/bricolage.v5i02>
- Susanto, E. F., & Kumala, A. (2019). Sikap Toleransi Antaretnis. *TAZKIYA: Journal of Psychology*, 7(2), 105–111. <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v7i2.13462>

- Tanjung, Y. C., & Marta, R. F. (2016). *Nilai Eksklusivitas Dalam Karya Foto Cover Majalah Tempo Edisi 4351 Tentang Kasus Bom Sarinah 2016*. 112–125.
- Tjajadi, O. P., Marta, R. F., & Engliana, E. (2021). Women's Resistance on Instagram Account @singlemomsindonesia. *JHSS Journal of Humanities and Social Studies*, 5(2), 111–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/jhss.v5i2.3710>
- Umari, F., & Indra Dewi, S. (2020). Strategi Komunikasi Politik Caleg Perempuan dalam Pileg 2019 di Kota Malang. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 2(2), 55–65. <https://doi.org/10.33366/jkn.v2i2.47>